

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bastian, I. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta.
- LAN dan BPKP. 2000. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik. Suatu Sarana Good Governance.
- Mustopadidjaya, AR. 2002. Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja.
- Rinaldi, R. R. 2016. Pengaruh Penerapan Good Governance, Audit Kinerja dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Universitas Muhamadiyah Surakarta, 1–12
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. CV Alfabeta. Bandung.
- Tahir, A. 2011. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta.

Jurnal:

- ADHISA NURAFIA RAHMA; (2022). *Peran E-Budgeting Untuk Mendukung Transparansi Anggaran Pada Pemerintah Kota Surakarta (Adhisa Nurafia Rahma; Utpala Rani)*. 39, 1.
- Aditya, B., Makatara, Y., Liebe, M., Utomo, D. D., Yul, F., & Marta, D. (2025). *Akuntabilitas Anggaran Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Kebijakan Keuangan di Era Digital*. 4(3), 7976–7981.
- Akbar, D. F., Kristanto, E. D., Syahputra, E. N., Kusmayati, N. K., & Kurniawati, Y. (2025). Dampak Kualitas Anggaran Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Keuangan Negara Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 954–959. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.454>
- Apriliani, A. S., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Wibowo, H. (2023). Procurement Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 7, 254–264.
- Arianto, A., Amanda, A., Fadhilah, A., Nur Fadila Qomari, F., Faizul Candra, I., Putri, M., & Saputra, B. (2025). *E-Budgeting Implementation on Public Financial Transparency and Accountability At the Communication and Information Department of Padang City*. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi*

- Negara*), 22(2), 191–202. <https://doi.org/10.46730/jiana.v22i2.8253>
- Firnanda, R., Aprilia, D., Permatasari, T., & Luthfi, A. (2025). Implementasi Sistem Anggaran Berbasis Teknologi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Modern Dan Tradisional*, 2(1), 59–67.
- Haris, A. (2025). Transformasi Digital Pengelolaan Anggaran Dana Desa; Studi Tentang *E-Budgeting*, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 5(1), 28–37. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v5i1.752>
- Kamil, S. K., Rahman, M. A., Publik, M. A., Studi, P., Universitas, M., & Putra, W. (2023). *Pendampingan Dan Pelatihan Penggunaan E-Budgeting Kepada Koperasi Wanita Nur-Hidayah Desa Putat , Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo*. 1(9), 1733–1737.
- Lathifah, H., Frinaldi, A., Asnil, & Putri, N. E. (2024). Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan. *Professional Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, 11(2), 585–592.
- Lestari Sitorus, Nurullaeli Uswatun H, Suci Ananda Sitompul, & Nazwa Feryal Kamila. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *Economic Reviews Journal*, 4(1), 235–244. <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.632>
- Marpaung, I. S., & Patriansyah, W. (2025). Pengaruh Implementasi Model Transformasi Digital dan Smart Governance Terhadap Efisiensi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah di Tapanuli Selatan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(9), 1862–1872. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i9.4468>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. *Permendagri Republik Nomor 70*, Nomor 65(879), 2004–2006.
- Nasution, D. A. D., & Rizqy Ramadhan, P. (2019). Pengaruh Implementasi *E-Budgeting* Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 669. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p26>
- No.28, U. (1999). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme*, 1, 1–5.
- Priono, U., Putri, D. A., & Mappadang, A. (2025). Peran Pengawasan dan Program Efisiensi dalam Mewujudkan Transparansi Pemerintah: Perspektif Good

Governance. *BENEFIT: Journal Of Business, Economics, And Finance*, 3(2), 2134–2149. <https://doi.org/10.70437/benefit.v3i1.1214>

Supratno, Y. H., Murtono, Mochamad, W., Tulak, T., Fatriyadi, R., Wardi, Y., Evanita, S., Yousif, N., Cole, J., Rothwell, J. C., Diedrichsen, J., Zelik, K. E., Winstein, C. J., Kay, D. B., Wijesinghe, R., Protti, D. A., Camp, A. J., Quinlan, E., Jacobs, J. V., ... Dublin, C. (2021). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Journal of Physical Therapy Science*, 9(1), 17–23. <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.07.010><http://dx.doi.org/10.1016/j.visres.2014.07.001><https://doi.org/10.1016/j.humov.2018.08.006><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582474><https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007><https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007>

Yomitami, S. A., & Subekti. (2021). Pengaruh Tekanan Eksternal, Implementasi *E-Budgeting*, dan Aksesibilitas terhadap Transparansi Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tegal. *JABKO: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, 1(2), 145–156. <https://doi.org/10.24905/jabko.v1i2.19>

Undang-Undang:

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. *Permendagri Republik Nomor 70, Nomor 65(879)*, 2004–2006.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2020). Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020. *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia*, 58(12), 7250–7257.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Media Hukum*, 184.

PP no 58 thn, 2008. (2005). Peraturan Pemerintah Republik 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 105.

No.28, U. (1999). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme*, 1, 1–5.

UNDANG UNDANG NO 14 TAHUN 2008. (2008).